

## EFEKTIFITAS KINERJA BPD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

*Agustya Lisdayanti*<sup>1</sup>  
*Raycard Destion Daniel*<sup>2</sup>  
*Wanda Anindita*<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma*

<sup>1</sup>*agustyal@gmail.com*

<sup>2</sup>*rdd\_blue@rocketmail.com*

<sup>3</sup>*wanda\_anindita@yahoo.co.id*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kinerja BPD telah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah tempat BPD tersebut berada. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah 26 BPD di Indonesia dengan 26 BPD bulan Desember tahun 2010 sebagai sampelnya. Data diambil dari situs resmi Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini meneliti total aset, total dana masyarakat, total kredit, dan modal dari laporan keuangan publikasi 26 BPD yang diungkap di BI pada Desember 2010. Kemudian hasil yang didapatkan akan dibandingkan dengan PDRB, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah kemiskinan, dan jumlah pengangguran yang ada di 26 daerah yang memiliki BPD tersebut dengan mengambil angka-angka pada tahun 2010 yang ada di BPS. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa keberadaan BPD di Indonesia pada Desember 2010, belum secara efektif membantu pembangunan daerah tempat BPD tersebut berada. Hal ini terlihat karena, meski BPD memiliki total aset, total dana masyarakat, total kredit, dan total modal yang besar (10 teratas) namun, 34,62% daerah tersebut masih termasuk ke dalam daerah dengan pengangguran dan/atau kemiskinan terbanyak di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *BPD, Ekonomi Daerah, 10 BPD Teratas, 10 Provinsi Teratas*

### PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dan sangat mempengaruhi perekonomian, baik secara mikro maupun secara makro. Di Indonesia, perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80 % dari keseluruhan sistem keuangan yang ada (Abidin, 2007). Salah satu bentuk bank operasional yang ada di Indonesia adalah bank pembangunan daerah, di mana kepemilikan saham dari bank tersebut umumnya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik Propinsi maupun Kotamadya dan Kabupaten dari suatu wilayah (Dwastarini, 2005 pada Permana, 2011).

Undang-undang no. 13 tahun 1962 tentang asas-asas ketentuan bank pembangunan daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana, serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang/penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan (Hasan, Anuar, dan Ismail 2010).

UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun

1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada di daerah. Namun, menurut Brodjonegoro dan Asanuma, 2000, banyak pemerintah daerah yang tidak siap untuk otonomi dalam hal perencanaan, pemrograman, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, karena kapasitas institusional mereka tetap kurang dikembangkan seperti halnya sumber daya kapasitas manusianya. Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abidin, Z dan Endri (2009) di mana mereka meneliti kinerja efisiensi teknis BPD dengan pendekatan DEA namun belum mengaitkan dengan kinerja BPD dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa selama periode 2006-2007 kinerja efisiensi teknis BPD mengalami peningkatan efisiensi namun masih belum efisien.

Oleh karena alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk melihat apakah kinerja BPD telah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah tempat BPD tersebut berada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah 26 BPD di Indonesia dengan 26 BPD bulan Desember tahun 2010 sebagai sampelnya. Dalam penelitian ini, tahun 2010 dipilih karena adanya keterbatasan sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari situs resmi Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini meneliti total aset, total dana masyarakat, total kredit, dan modal dari laporan keuangan publikasi 26 BPD yang diungkap di BI pada Desember 2010 karena dianggap mampu mencer-

minkan kinerja BPD. Kemudian hasil yang didapatkan akan dibandingkan dengan PDRB, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah kemiskinan, dan jumlah pengangguran yang ada di 26 daerah yang memiliki BPD dengan mengambil angka-angka pada tahun 2010 yang ada di BPS.

Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari sisi pengeluaran, PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto di suatu wilayah dan dilihat dari sisi produksi PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun) (Almulaibari dan Woyanti, 2011).

Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan adalah sebagai standar hidup tingkat rendah dalam hal kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan secara umum yang berlaku dalam masyarakat (Hudaya 2009: 6 dalam Jayadi, 2012).

Menurut BPS, pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Untuk mengukur kinerja BPD maka indikator yang diteliti adalah total aset, total dana masyarakat, total kredit, dan modal yang dimiliki BPD. Total dana masyarakat yang digunakan terdiri atas giro, deposito, dan tabungan. Menurut UU no. 10 tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dila-

kukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan peminahbukuan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kredit menurut UU perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sehubungan dengan tahap penguatan struktur perbankan nasional pilar I API yang bertujuan memperkuat permodalan Bank yaitu meningkatkan persyaratan modal minimum bagi Bank umum (termasuk BPD) menjadi Rp 100 M sampai dengan 1 Januari 2011 dan mempertahankan persyaratan modal Rp 3 Triliun untuk pendirian bank baru sampai dengan 1 Januari 2011 (Wirakusumah, 2012).

Dengan adanya modal dari pihak ketiga khususnya modal pemerintah yang ditempatkan pada BPD akan menjadikan beban sekaligus pendapatan bagi BPD. Menjadi beban karena bank diwajibkan membayar atas bunga yang ditempatkan dalam bentuk giro Pemerintah Daerah (PEMDA). Jika selisih antara beban dan pendapatan yang dihasilkan lebih besar daripada penghasilan, maka keuntungan

yang akan diperoleh, dan begitu sebaliknya (Hasan, Anuar, dan Ismail 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa dari 26 BPD, BPD yang memiliki Total Aset terbanyak adalah PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 42,042,493,000,000, BPD yang memiliki Total Aset terendah adalah PT. BPD Sulawesi Tengah sebesar Rp 1.229.252.000.000. BPD yang memiliki Total Dana Masyarakat terbesar adalah PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 31,018,168,000,000, BPD yang memiliki Total Dana Masyarakat terkecil adalah PT. BPD Sulawesi Tengah sebesar Rp 635,043,000,000.

Dari 26 BPD, BPD yang memiliki Total Kredit terbanyak adalah PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 22,046,783,000,000, BPD yang memiliki Total Kredit terkecil adalah PT. BPD Sulawesi Tengah sebesar Rp 542,612,000,000. BPD yang memiliki Modal terbesar adalah PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 3,247,496,000,000, BPD yang memiliki Modal terkecil adalah PT. BPD Bengkulu sebesar Rp 116,930,000,000.

Dari 26 provinsi yang memiliki BPD, provinsi yang memiliki PDRB terbesar adalah Jawa Barat dan Banten sebesar Rp 410,269,611,100,000, PDRB terendah adalah PT. BPD Maluku sebesar Rp 7,286,480,890,000. Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat dan Banten sebesar 53,685,900 jiwa, provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah PT. BPD Maluku sebesar 1,533,500 jiwa.

Tabel 1.

Total Aset, Total Dana Masyarakat, Total Kredit, Modal, PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan per Kapita, Jumlah Kemiskinan, dan Jumlah Pengangguran tertinggi, terendah, dan rata-rata bulan Desember 2010

No	Nama Variabel	Jumlah	Tertinggi	Terendah	Rata-rata
1	Total Aset	26	Rp 42,042,493,000,000	Rp 1,229,252,000,000	Rp 9,213,469,346,154
2	Total Dana Masyarakat	26	Rp 31,018,168,000,000	Rp 635,043,000,000	Rp 6,977,339,076,923
3	Total Kredit	26	Rp 22,046,783,000,000	Rp 542,612,000,000	Rp 5,401,130,115,385
4	Modal	26	Rp 3,247,496,000,000	Rp 116,930,000,000	Rp 570,016,461,539
5	PDRB	26	Rp 410,269,611,100,000	Rp 7,286,480,890,000	Rp 85,256,738,221,923
6	Jumlah Penduduk	26	53,685,900 jiwa	1,533,500 jiwa	9,030,869 jiwa
7	Pendapatan Perkapita	26	Rp 41,181,592	Rp 2,675,526	Rp9,600,777
8	Jumlah Kemiskinan	26	5,531,900 jiwa	164,200 jiwa	1,171,781 jiwa
9	Jumlah Pengangguran	26	2,677,800 jiwa	39,300 jiwa	319,173 jiwa

Sumber: BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) dan BI ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Dari 26 provinsi yang memiliki BPD, provinsi yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 41,181,592, provinsi yang memiliki pendapatan per kapita terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 2,675,526. Provinsi yang memiliki jumlah kemiskinan terbesar adalah provinsi Jawa Barat dan Banten sebesar 5,531,900 jiwa, jumlah kemiskinan terkecil adalah provinsi Kalimantan Tengah sebesar 164,200 jiwa. Provinsi yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak adalah provinsi Jawa Barat dan Banten sebesar 2,677,800 jiwa, provinsi yang memiliki jumlah pengangguran terkecil adalah provinsi Bengkulu sebesar 39,300 jiwa.

Sedangkan, 10 BPD yang memiliki total aset, total dana masyarakat, total kredit, dan total modal terbanyak pada Desember 2010 dari 26 BPD yang ada.

Urutan pertama BPD yang memiliki total aset terbanyak adalah PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 42,042,493,000,000. Urutan pertama BPD yang memiliki total dana masyarakat terbesar adalah PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 31,018,168,000,000. Urutan pertama BPD yang menyalurkan Kredit terbanyak adalah (PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk) sebesar Rp 22,046,783,000,000. Urutan pertama BPD yang memiliki Modal terbesar adalah PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp. 3,247,496,000,000. Selanjutnya, dapat diketahui 10 provinsi yang memiliki BPD terkait PDRB, jumlah penduduk, pendapatan perkapita, jumlah kemiskinan, dan jumlah pengangguran tahun 2010. Provinsi yang memiliki PDRB terbesar adalah Jawa Barat dan Banten sebesar Rp 410,269,611,100,000.

Tabel 2.  
10 teratas Total Aset, Total Dana Masyarakat, Total Kredit, dan Modal BPD  
pada Desember 2010

<b>10 BPD Teratas</b>				
<b>Urutan</b>	<b>Total Aset Tertinggi</b>	<b>Total Dana Masyarakat</b>	<b>Total Kredit</b>	<b>Modal</b>
1	PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk			
2	PT. BPD Jawa Timur	PT. BPD Jawa Timur	PT. BPD Jawa Timur	BPD Kalimantan Timur
3	PT. BPD Jawa Tengah			
4	PT. Bank DKI	PT. Bank DKI	PT. BPD Sumatera Utara	PT. Bank Aceh
5	BPD Kalimantan Timur	BPD Kalimantan Timur	BPD Kalimantan Timur	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau
6	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau	PT. BPD Sumatera Utara	PT. Bank DKI	PT. BPD Jawa Timur
7	PT. BPD Sumatera Utara	PT. Bank Aceh	PT. Bank Aceh	PT. BPD Papua
8	PT. Bank Aceh	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau	PT. BPD Sumatera Utara
9	PT. BPD Papua	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau	PT. BPD Sumatera Barat	PT. Bank DKI
10	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	PT. BPD Papua	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Sumber: BI ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Dari Tabel 3, dapat diketahui 10 provinsi yang memiliki BPD terkait PDRB, jumlah penduduk, pendapatan perkapita, jumlah kemiskinan, dan jumlah pengangguran tahun 2010. Provinsi yang memiliki PDRB terbesar adalah Jawa Barat dan Banten sebesar Rp 410,269,611,100,000. Provinsi dengan Jumlah penduduk terbanyak adalah provinsi Jawa Barat dan Banten sebanyak

53,685,900 jiwa. Provinsi yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 41,181,591.79. Provinsi yang memiliki jumlah kemiskinan tertinggi adalah provinsi Jawa Barat dan Banten sebanyak 5,531,900 jiwa. Provinsi yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak adalah provinsi Jawa Barat dan Banten sebanyak 2,677,800 jiwa.

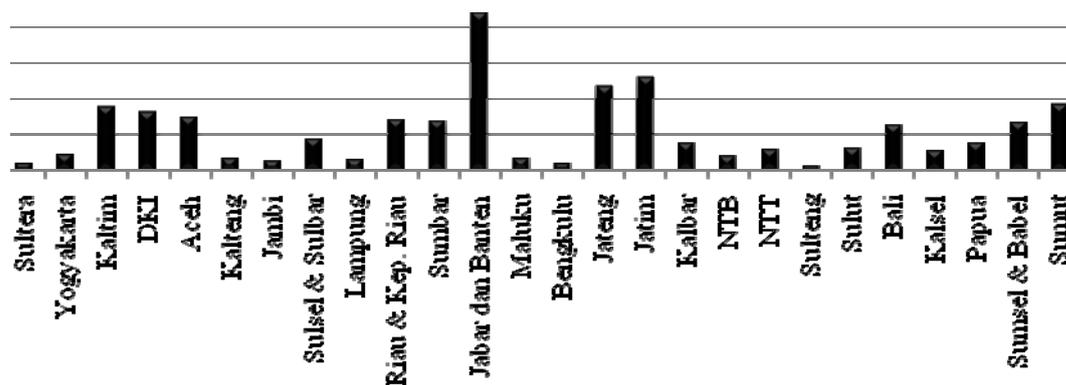
Tabel 3.  
10 teratas PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan per Kapita, Jumlah Kemiskinan, dan Jumlah Pengangguran provinsi pada Desember 2010

10 Provinsi Teratas					
Urutan	PDRB	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita	Jumlah Kemiskinan	Jumlah Pengangguran
1	Jawa Barat dan Banten	Jawa Barat dan Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat dan Banten	Jawa Barat dan Banten
2	DKI Jakarta	Jawa Timur	Kalimantan Timur	Jawa Timur	Jawa Tengah
3	Jawa Timur	Jawa Tengah	Riau dan Kepulauan Riau	Jawa Tengah	Jawa Timur
4	Jawa Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Tengah	Sumatera Utara	DKI Jakarta
5	Riau dan Kepulauan Riau	DKI Jakarta	Sumatera Utara	Lampung	Sumatera Utara
6	Sumatera Utara	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Jawa Timur	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
7	Kalimantan Timur	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
8	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Lampung	Kalimantan Selatan	Nusa Tenggara Timur	Riau dan Kepulauan Riau
9	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Riau dan Kepulauan Riau	Sulawesi Utara	Nusa Tenggara Barat	Lampung
10	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Aceh	Kalimantan Timur

Sumber: BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Berdasarkan Gambar 1, ternyata peran BPD belum optimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini bisa dilihat dari total kredit yang disalurkan oleh BPD yang pada kenyataannya berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah pendapatan perkapita daerah tersebut. Dari 10 BPD teratas dengan total kredit terbanyak, 6 dari 10 BPD dalam hal penyaluran kreditnya ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah

pendapatan per kapita daerahnya. Hal ini menegaskan bahwa BPD ternyata belum bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif sehingga menyebabkan timpangnya tingkat pemanfaatan kredit dengan jumlah pendapatan perkapitanya. Hal ini masih selaras dengan penelitian Abidin Z. dan Endri (2009) mengenai kinerja efisiensi teknis BPD dengan pendekatan DEA yang dilakukannya.



Gambar 1. Grafik Total Kredit BPD Desember 2010  
Sumber: BI ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang telah dibahas di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan BPD di Indonesia pada Desember 2010, belum secara efektif membantu pembangunan daerah tempat BPD tersebut berada. Hal ini terlihat karena, meski BPD memiliki total aset, total dana masyarakat, total kredit, dan total modal yang besar (10 teratas), namun 34,62 % daerah tersebut masih termasuk ke dalam daerah dengan pengangguran dan/atau kemiskinan terbanyak di Indonesia seperti pada provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Aceh, Riau dan Kep. Riau, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, serta Sumatera Utara. Bahkan provinsi papua yang memiliki total aset, total dana masyarakat, dan total modal yang masuk ke dalam peringkat 10 besar, tidak memiliki pengaruh berarti pada angka PDRB maupun pendapatan per kapitanya.

Untuk penelitian selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan sumber data dan sumber teori yang lebih aktual, agar lebih mampu mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya yang telah mengalami perubahan terus-menerus. Kemudian disarankan pula untuk

menggunakan sampel yang lebih besar (lebih dari tiga tahun) dan menambah variabel kinerja BPD serta menambah variabel indikator pertumbuhan ekonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2007. Kinerja efisiensi pada bank umum” *Proceeding PESAT 2* (1858-2559) A113-A119.
- Abidin, Z., & Endri. 2009. Kinerja efisiensi teknis bank pembangunan daerah: Pendekatan data envelopment analysis (DEA)” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 11*, 21-29.
- Almulaibari, H., & Woyanti, N. 2011 *Analisis potensi pertumbuhan ekonomi kota Tegal tahun 2004-2008*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 12, Februari, 2013. *Kemiskinan, jumlah penduduk, PDRB, dan pengangguran*. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Bank Indonesia. 11, Februari, 2013. *Undang-undang, total aset, total dana masyarakat, total kredit, dan modal*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).
- Brodjonegoro, B., & Asanuma, S. 2000 Regional autonomy and fiscal decentralization in democratic Indonesia. *Hitotsubashi Journal of Economics* , 41, 111-122.

- Hasan, A., Anuar, K., & Ismail, G. 2010. Studi pengaruh makro ekonomi, capital, dan liquidity terhadap financial performance pada bank pembangunan daerah di Indonesia sebelum dan setelah otonomi daerah. *Universitas Riau, University Kebangsaan*.
- Jayadi. 2012. *The dynamic analysis of inflation rate and farmer's welfare for rural poverty reduction in Indonesia*. International Institute of Social Studies, Hague.
- Permana, A.R. 2011. *Pengaruh prediktabilitas laba terhadap kinerja bank pembangunan daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS, Surabaya.
- Wirakusumah, N. 2012. *Analisa perbandingan kinerja keuangan BPD dan bank swasta nasional sebelum dan sesudah penerapan arsitektur perbankan Indonesia*. Universitas Gunadarma, Depok.